

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# PDIP Desak BPK Audit Transjakarta

## ▶ Buntut Dilaporkan ke KPK Soal Tap In-Tap Out

### Gambir, Warta Kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit PT Transjakarta.

Audit diperlukan buntut perseroan yang bergerak di bidang transportasi itu di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengelolaan tiket penumpang.

"BPK harus audit total seluruh pengelolaan saldo dan adanya pemotongan, karena ini untuk public service (layanan publik) di Transjakarta," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo pada Selasa (15/11/2022).

Menurut Rio, audit diperlukan untuk menemukan titik terang dari dugaan korupsi pada pemotongan saldo penumpang. Diketahui setelah melakukan tap-in, para penumpang juga diwajibkan tap-out sebelum turun dari Transjakarta.

Namun beberapa pelanggan mengeluhkan, duit mereka yang tersimpan dalam kartu uang elektronik (KUE) justru terpotong dua kali saat melakukan tap-out.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Musa Emyus bersama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) kemudian melaporkan Transjakarta ke KPK pada Senin (14/11/2022) lalu.

Meski tap-in dan tap-out merupakan kebijakan baru, namun Rio meminta kepada Transjakarta untuk bertanggungjawab jika ada pengaduan dari penumpang.

Salah satu caranya adalah mengembalikan duit penumpang yang terpotong dua kali saat mereka naik Transjakarta.

"Pertama, dipastikan apakah peristiwa ini sebagai bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kedua, harus ada me-

kanisme pengembalian pemotongan saldo kepada pengguna, bentuknya harus dirumuskan yang realistis dan tepat," katanya.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan melakukan verifikasi awal terhadap laporan tersebut.

"Selanjutnya Tim Pengaduan masyarakat KPK segera melakukan verifikasi awal," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Ali mengatakan, setelah diverifikasi laporan itu akan diteruskan ke tahap telaah. Pada tingkat ini, KPK akan menggali informasi lebih lanjut.

Ia mengungkapkan, proses ini mesti dilaksanakan untuk menilai apakah aduan Musa Emyus masuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi dan menjadi wewenang KPK.

"Kami pastikan, KPK juga secara proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan," ujar Ali.

Sedangkan Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin berujar, kendala pemotongan saldo pelanggan hingga dua kali itu semakin berkurang.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan perbaikan sistem serta teknis oleh PT JakLingko. Dalam kesempatan itu, Kamaluddin menyatakan, ada total 1.338 pelanggan Transjakarta yang melapor berkait pemotongan saldo sebanyak dua kali.

"Total refund (pengembalian dana) yang berhasil dikembalikan sejumlah 3.464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut," ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (15/11/2022). ([faf/m36/Kompas.com](#))